

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAMBI TERHADAP  
PENGUNA/ PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DI KOTA JAMBI**

**Hafrida**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi  
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat Jambi

**Abstrak**

Penelitian tentang Putusan Hakim dalam perkara Penyalah Guna Narkotika ini bertujuan untuk melihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara bagi penyalah guna narkotika. Urgensi penelitian ini dikarenakan Propinsi Jambi sepanjang tahun 2011 menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) menempati urutan ke 13 wilayah terbesar penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya Data BNN Provinsi Jambi menyebutkan, selama tahun 2011, terdapat 441 orang narapidana yang tersandung kasus Narkoba. Jambi termasuk daerah paling rawan/paling strategis keluar masuk narkotika. Terhadap penyalah Guna narkotikan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa terhadap penyalah guna narkotika diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) sementara menurut ketentuan Pasal 54 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa Pecandu narkotika dan Korban enyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Melihat pada rumusan kedua pasal ini terjadi suatu kontradiksi disatu sisi pelaku penyalahguna narkotika dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan disisi lain pengguna dan pcandu diwajibkan untuk direhabilitasi. Data Lapangan menyebutkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Jambi terhadap Pengguna Narkotika Masih menggunakan Pendekatan Pidana Penjara dengan prosentase 80, 6% dipidana penjara jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan selebihnya adalah pidana penjara antara 1-2 tahun. Sementara menurut Pasal 4 Undang-undang Narkotika menyebutkan bahwa Negara berkewajiban untuk menjamin rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Oleh sebab itu maka penelitian ini merekomendasikan (1) Penghapusan pasal 127 karena ketentuan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 khususnya Pasal 4d. (2) Meyempurnakan rumusan pasal 111 dan Pasal 112 tentang menyimpan, memiliki dan menguasai secara melawan hukum terhadap narkotika harus ditegaskan dengan tujuan bukan untuk dikonsumsi sendiri.

**Kata kunci:** Penyalah Guna Narkotika, Putusan Hakim

**PENDAHULUAN**

Kejahatan Narkotika merupakan tindak pidana *Extra ordinary Crime* karena sudah melewati batas-batas negara (*Trans National Organise Crimes*) oleh sebab itu untuk mengatasi kejahatan narkotika tidak dapat jika hanya dilakukan oleh satu instansi saja (Kepolisian) tetapi diperlukan peran serta seluruh instansi terkait disertai

dengan peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi tentang kejahatan narkotika yang terjadi. Karena dari berbagai data dan informasi menunjukkan bahwa jika masalah Narkotika ini tidak segera diatasi maka Indonesia akan segera menjadi Negara ke 5 pengguna Narkotika di Dunia. Mengingat begitu seriusnya permasalahan penyalahgunaan narkotika ini sebagaimana terhadap kejahatan

lainnya maka akan menimbulkan korban kejahatan yang tentunya harus diberikan perhatian serius dan memberikan perlindungan hukum yang layak bagi mereka. Begitu juga terhadap para korban dari kejahatan narkoba ini tentunya menimbulkan banyak korban. Tetapi berbeda dengan korban kejahatan lainnya, maka korban kejahatan narkoba justru dipandang sebagai pelaku. Diberbagai Negara seperti Inggris dan Australia, menempatkan para pengguna Narkoba sebagai korban bukan sebagai pelaku, oleh karenanya para pengguna narkoba akan segera difasilitasi untuk direhabilitasi dan ditangani oleh para ahli.

Pengaturan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pada Pasal 1 angka 13 menjelaskan pelaku sebagai Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis serta pada Pasal 1 angka 15 menjelaskan pelaku sebagai penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatur pada Penyalah Guna Narkoba dipandang sebagai kriminal sebagaimana diatur dalam **Pasal 127**

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Tetapi selain itu dalam **Pasal 103** menyebutkan:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Jika kita perhatikan ketentuan tersebut di atas terdapat kontradiksi norma dalam peraturan perundang-undangan ini. Di satu sisi memandang penyalahguna/pemakai narkoba sebagai pelaku tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara tetapi disisi lain dalam pasal yang lain menentukan bahwa hakim dapat memerintahkan pada pecandu untuk direhabilitasi dan di berikan pengobatan. Kontradiksi norma ini akan membawa dampak pada ketidakpastian dalam penegakan hukumnya khususnya pada penegakan hukum bagi penyalah guna narkoba maupun pecandu.

Propinsi Jambi sepanjang tahun 2011 menurut Badan Narkoba Nasional (BNN) menempati urutan ke 13 wilayah terbesar penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya menurut Data BNN Provinsi Jambi menyebutkan, selama tahun 2011, terdapat 441 orang narapidana yang tersandung kasus Narkoba. Kemudian ada 613 orang terkena AIDS. Selain itu,

terdapat 100 orang yang jadi pasien RSJ akibat Narkoba. Ditambah lagi ada 1.000 eks korban Narkoba yang dibina berbagai LSM. Belum lagi ada 174 kasus Narkoba yang ditangani oleh Polda Jambi. "Jika satu orang ini mempunyai jaringan 20 orang, artinya pengguna Narkoba di Jambi mencapai 46.560 orang," ungkap Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, Kombespol M Yamin. Bahkan dari hasil survei BNN 2012 Jambi termasuk daerah paling rawan/paling strategis keluar masuk narkotika. Dari sembilan kabupaten dan dua kota di Jambi, tercatat empat daerah (satu kota dan tiga kabupaten) menjadi basis bagi pengguna maupun peredaran narkoba. Ke empat daerah itu, yakni Kota Jambi, Bungo, Sarolangun, dan Tanjab Barat. Jika diurut berdasarkan rangking, menurut Kepala BNNP Jambi, Kota Jambi merupakan urutan pertama daerah paling rawan penggunaan dan peredaran narkoba di Jambi. Kemudian, disusul Kabupaten Bungo, Sarolangun dan Kabupaten Tanjab Barat.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melakukan analisis terhadap putusan-putusan hakim terhadap pemakai/pecandu narkotika pada Pengadilan Negeri Jambi, dimana analisis ini akan lebih focus pada memperhatikan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. yang berjudul "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi**".

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan Normatif guna

menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Kota Jambi terhadap perkara pengguna/pemakai/pecandu narkotika.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Karena penelitian ini merupakan penelitian normative maka pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*).

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini berupaya melakukan kajian-kajian berdasarkan konsep dan teori hukum tertentu, sehingga spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini juga bersifat analitis karena paparan yang disampaikan oleh peneliti selanjutnya wajib untuk dianalisis dengan menggunakan kerangka konseptual dan teori. Hasil analisis inilah yang kemudian akan memunculkan rumusan tentang kebijakan kriminal terhadap pengguna/pemakai/pecandu narkotika.

### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berasal dari Keputusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Jambi tentang Perkara Pengguna/Pemakai Narkotika, Peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara kualitatif yakni menafsirkan dan menjabarkan data berdasarkan asas-asas hukum, norma hukum dan teori hukum.

## **5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

- Perangkat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkoba termasuk berbagai pertauran tentang rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkoba.
- Putusan Hakim Pengadilan Kota Jambi atas Perkara Penyalahgunaan narkoba terhadap Pemakai/Pecandu/Pengguna.

b. Bahan hukum sekunder yaitu berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta berbagai literatur yang berkaitan dengan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkoba.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis. Analisis akan lebih difokuskan pada dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terhadap pengguna/pemakai/pecandu apakah sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana yaitu “Penanggulangan Tindak Pidana”.

## **6. Metode Analisis Data**

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis kualitatif tersebut lalu diuraikan secara deskriptif dan perspektif. Analisis deskriptif perspektif ini bertitik tolak dari analisis yuridis historis, analisis sistematis dan komparatif terkait perumusan kebijakan hukum pidana dalam memandang pelaku penyalahgunaan

narkotika sebagai pengguna/pecandu narkoba sehingga kebijakan hukum pidana atas pengguna/pemakai/pecandu narkoba ini akan selaras dan serasi dengan tujuan penegakan hukum pidana yaitu penanggulangan tindak pidana. Analisis deskriptif dan perspektif ini bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis yang pendalamannya dikaitkan dengan analisis yuridis historis dan analisis yuridis komparatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam memutus perkara terhadap Penyalah Guna Narkoba.**

#### **1. Pertumbuhan Penyalah Guna Narkoba di Kota Jambi**

Dari berbagai data yang ada menunjukkan tingkat pertumbuhan penggunaan narkoba semakin meningkat dan memprihatinkan. Khusus mengenai angka bagi Pengguna narkoba selama 4 (empat) tahun terakhir yang terus meningkat sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Narkoba Polda Jambi Kombes Pol. Edi Purwanto mengatakan perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jambi, dari tahun ke tahun memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Sebagaimana data yang ada pada 2004 yang tertangkap 187 tersangka, pada 2005 (203), 2006 (375) dan 2007 (488 tersangka). Jumlah pengunjung dan pasien narkoba mendapatkan perawatan selama 2007 sebanyak 459 orang dimana jumlah penderita terbanyak dari Kota Jambi mencapai 356

penderita.<sup>2</sup> Dan dalam skala nasional menurut Jambi Star edisi 25 Nopember 2012 menyebutkan bahwa Jambi menduduki urutan 6 dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika. Dan dalam skala propinsi maka kota jambi menempati urutan pertama terparah disusul Kabupaten Bungo. Menurut Data pada Sat Res Narkoba Polresta Jambi sejak Januari hingga Mei 2012 lalu, ada sebanyak 48 kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan jumlah tersangka sebanyak 66 orang.

Data dari BNN (Badan Narkotika Nasional), saat ini tercatat 50.430 jiwa di Jambi terkena narkoba atau sekitar 2,31 persen dari jumlah penduduk Jambi. Dan angka ini merupakan angka yang terungkap dan diyakini angka yang tidak terungkap jauh lebih banyak lagi, hal ini sebagaimana fenomena gunung es dimana yang muncul kepermukaan hanya sebagian kecil saja.

Melihat pada data tersebut perkembangan penyalahgunaan narkotika di Kota Jambi sudah sampai pada tahap yang sangat memprihatinkan untuk itu diperlukan suatu langkah penanggulangan yang sungguh-sungguh dan komprehensif yang melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, Keluarga dan Partisipasi masyarakat.

## **2. Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penyalah Guna Narkotika di Pengadilan Negeri Jambi.**

Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana. Kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal menurut Barda Nawawi Arief Dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan merupakan Tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana. Dengan demikian penerapan pidana oleh badan pengadilan akan tercermin dalam putusan hakim, begitu juga terhadap Penyalah Guna Narkotika, penetapan sanksi pidana dalam perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang No.35 Tahun 2009 pada tataran penerapannya akan terlihat dalam putusan hakim pengadilan.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi tahun 2011 terhadap Penyalah Guna Narkotika dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1:  
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Penyalah Guna Narkotika  
Tahun 2011

Nomor Perkara	Dakwaan	Pasal Terbukti	Putusan Hakim
02/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
07/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 111, Pasal 127	Pasal 127	1 Tahun 4 bulan
08/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	7 bulan
115/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	1 tahun
149/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
150/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
170/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	2 tahun
210/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	10 bulan
211/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	7 bulan
225/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127, Pasal 116	Pasal 127	10 bulan
228/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	10 bulan
240/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
248/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	11 bulan
249/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	1 tahun 3 bulan
297/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
312/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	7 bulan
314/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	1 tahun
341/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	10 bulan
367/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	10 bulan
405/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
423/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	7 bulan
447/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	10 bulan
448/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	6 bulan
460/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	7 bulan
461/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	7 bulan
481/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
482/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
541/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	1 tahun
555/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
556/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan
574/Pid.B/2011/PN.JBI	Pasal 114, Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	8 bulan

Melihat pada tabel 1 tersebut di atas ada beberapa hal yang patut kita cermati yaitu:

1. Perkara terhadap Penyalah Guna Narkotika (Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009) selalu di dakwaan dengan menggunakan dakwaan alternatif dan selalu dialternatifkan dengan pasal 114 dan pasal 112. (18 perkara dari 31 perkara atau 58, 06%), selebihnya hanya dialternatifkan dengan Pasal 112 (9

2. perkara dari 31 perkara atau 29,03%) dan sisanya dialternatifkan hanya dengan pasal 114 yaitu 4 perkara atau
3. 12,09). Hal ini dapat terjadi karena perumusan pasal 112, 114 dan pasal 127 undang-undang narkotika terkesan tumpang tindih dan kurang jelas. Dari rumusan Pasal-pasal tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam perumusan normanya yaitu

Pasal 112 tidak menyebutkan secara tegas bahwa pasal ini ditujukan untuk mereka yang dengan sengaja menyimpan, memiliki Narkotika dengan tujuan bukan untuk diri sendiri. Penegasan norma ini harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dalam tataran penegakan hukumnya.

Di Indonesia yang merupakan *Civil Law System* yang lebih menitik beratkan pada kepastian maka perumusan norma harus benar-benar memenuhi azas “Lex certa” yaitu tidak dapat ditafsirkan lain, rumusan suatu norma harus jelas dan tegas tidak mengandung konotasi lain dan dapat ditafsirkan lain. Ketidakjelasan dalam perumusan norma seperti ini akan mempengaruhi penegakan hukumnya. Ketika seorang Penyalah Guna Narkotika tertangkap aparat dan padanya terdapat Narkotika yang diperuntukan bagi konsumsi dirinya sendiri maka secara otomatis si Penyalah Guna dapat dikenakan pasal 112 karena unsur-unsur yang rumuskan dalam Pasal 112 tidak secara tegas mengatur bahwa yang dimaksud memiliki, menyimpan dalam rumusan pasal ini adalah memiliki dan menyimpan bukan dengan tujuan untuk konsumsi sendiri. Karena seorang Penyalah Guna akan secara otomatis memiliki atau menyimpan narkotika. Rumusan norma yang demikian akan sangat merugikan para pengguna Narkotika itu sendiri dengan demikian para pengguna narkotika justru tidak terlindungi dan tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang ini. Sementara dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 4 d menyebutkan:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Kondisi ini justru menimbulkan ketidak pastian dalam penerapan hukumnya. Dan semakin menjauh dari tujuan undang-undang ini yaitu memberikan jaminan bagi rehabilitasi baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

2. Dari Penerapan pidananya pada Tabel 1 ini dapat kita lihat bahwa penerapan pidana terhadap Penyalah Guna masih didominasi oleh Pidana penjara jangka pendek (kurang dari 1 tahun) sebagai berikut:

- a. Pidana penjara lamanya 6 – 11 bulan berjumlah 25 perkara dari keseluruhan 31 perkara atau 80,64 %
- b. Pidana penjara Lamanya 1 tahun – 2 tahun berjumlah 6 perkara dari keseluruhan 31 perkara atau 25, 8 %.

Putusan hakim pengadilan negeri jambi pada tahun 2011 terhadap 31 kasus penyalah guna narkotika yang menjatuhkan pidana penjara di bawah 1 tahun sebesar 80,64%. Pidana penjara di bawah satu tahun termasuk dalam kelompok pidana penjara singkat. Terhadap pelaku yang dijatuhi pidana penjara di bawah satu tahun dan di kirim ke lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan adalah kemustahilan. Karena proses di lembaga pemasyarakatan itu sendiri akan efektif jika diterapkan bagi para narapidana yang memiliki pidana jangka menengah dan jangka panjang. Sehingga putusan hakim pengadilan negeri jambi yang memutus pidana penjara jangka pendek terhadap

penyalah guna narkoba sebesar 80,64% adalah praktis tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan.

Dari ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang undang narkoba ini menunjukan bahwa hakim diwajibkan untuk memperjhatikan ketentuan ketiga pasal tersebut sebelum memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara bagi penyalah guna yang juga pecandu narkoba. Sebelum hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara bagi penyalah guna narkoba maka hakim harus memutuskan atau menentukan apakah penyalah guna tersebut adalah pecandu atau bukan. Dan biasanya seorang penyalah guna Narkoba adalah seorang pecandu. Jika dia adalah pecandu maka hakim wajib untuk mempertimbangkan tidak memutuskan pidana penjara bagi penyalah guna apalagi pidana penjara yang jangka pendek.

Gambaran Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap Penyalah Guna Narkoba menunjukan hakim kurang menggunakan "kepekaan" daam putusannya, sebagaimana dikemukakan oleh Widodo Dwi Putro bahwa Kepekaan hakim adalah "*Conscience of The Court*" dan kepekaan hakim tidak akan mengurangi indepedensi hakim. seorang hakim seharusnya dalam memeriksa dan menganalisis sebuah perkara dan menetapkan putusannya seharusnya tidak hanya berlandaskan pada ketetapan normatif semata. Disinilah dituntut penalaran hakim dalam memutus suatu perkara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan Pasal 54 tentang kewajiban untuk menjalankan

rehabilitasi dan pengobatan bagi pecandu dan pasal 103 tentang kewajiban hakim untuk memerintahkan pada pecandu untuk menjalani rehabilitasi dan pengobatan. Seharusnya sebelum menentukan apakah penyalah guna narkoba terbukti atau tidak melanggar unsur pada rumusan Pasal 127 maka hakim diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan apakah si pelaku penyalah guna narkoba tersebut pecandu atau bukan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu: Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Dari pengertian tersebut menyebutkan pecandu adalah pengguna narkoba yang dalam kondisi ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Dari aspek praktis terhadap penyalah guna narkoba bisa dikatakan 99% penyalah guna narkoba adalah pecandu sehingga dapat dikatakan sesungguhnya Pasal 127 yang menetapkan sanksi pidana atau kriminalisasi terhadap pelaku penyalah guna narkoba sejatinya tidak harus diterapkan karena undang-undang narkoba telah memerintahkan bahwa terhadap pecandu harus direhabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial dan hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang narkoba ini pada Pasal 4 d: menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.

Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam memutus perkara terhadap Penyalah Guna narkoba belum sepenuhnya mengikuti amanta undang-undang untuk meberikan jaminan



rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkotika. Artinya prinsip penjatuhan pidana dengan menggunakan “The Best Interest” bagi Penyalah Guna Narkotika yang sebagian terbesar adalah pecandu belum terlihat nyata. Sehingga Hakim Pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika harus lebih mengedepankan nilai rasa keadilan dan kemanfaatan. Hakim dituntut untuk lebih memperhatikan filosofi penjatuhan sanksi secara lebih mendasar dengan lebih memperhatikan amanat undang-undang dan harapan masyarakat luas. Karena Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana harus melalui suatu pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain dari penerapan metode-metode yang rasional. Karena menurut J. *Andenaes* pendekatan kebijakan kriminal yang rasional erat hubungannya dengan pendekatan yang ekonomis, termasuk mempertimbangkan efektivitas sanksi pidana itu sendiri. Sanksi pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah
- b. pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya kerugian yang lebih kecil.<sup>3</sup>

Jika pengenaan sanksi pidana terutama sanksi pidana penjara diterapkan secara emotional tanpa mempertimbangkan

berbagai aspek sebagaimana yang dirumuskan di atas maka dikhawatirkan akan terjadi over atau kelampauan batas dari penerapan sanksi pidana tersebut.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam memutus perkara terhadap Penyalah Guna narkotika belum sepenuhnya mengikuti amanat undang-undang ini terutama ketentuan Pasal 127 ayat (2) yang menyebutkan Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Seharusnya dengan memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan 103 undang-undang ini maka putusan berupa pemidanaan berupa pidana penjara terhadap penyalah guna harus diupayakan sebagai alternatif terakhir. Namun dari data lapangan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim masih lebih mengutamakan menggunakan sanksi pidana penjara terhadap penyalah guna narkotika terutama penerapan pidana penjara jangka pendek (kurang dari 1 tahun). Sementara menurut Pasal 4 d menyebutkan bahwa tujuan undang-undang narkotika ini adalah untuk memberikan jaminan rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.
2. Penerapan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penyalah guna selalu didakwakan secara

alternatif/subsidi dengan Pasal 112. Hal ini terjadi karena perumusan Pasal 112 tidak merumuskan secara tegas bahwa yang dimaksud “barang siapa tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 adalah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan dengan tujuan untuk konsumsi sendiri”. Hal ini sangat penting karena seorang penyalah guna atau pecandu pada saat tertangkap ditemukan bukti keberadaan narkotika pada dirinya. Dengan ketidakjelasan rumusan Pasal 112 ini maka terhadap Penyalah Guna akan selalu terancam pasal ini, sementara pasal ini memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Kondisi ini tentu saja menimbulkan keadaan ketidakpastian dalam penerapan hukumnya.

3. Dari aspek praktis penyalah guna narkotika bisa dikatakan 99% penyalah guna narkotika adalah pecandu sehingga dapat dikatakan sesungguhnya Pasal 127 yang menetapkan sanksi pidana atau kriminalisasi terhadap pelaku penyalah guna narkotika sejatinya tidak harus diterapkan karena undang-undang narkotika telah memerintahkan bahwa terhadap pecandu harus direhabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial dan hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang narkotika ini pada Pasal 4 d: menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Sehingga pendekatan kebijakan non penal haruslah lebih dikedepankan dalam penanganan terhadap penyalahguna/pengguna/pecandu narkotika.

#### **B. Saran**

1. Pasal 127 direkomendasikan untuk dihapuskan karena ketentuan pasal

ini bertentangan dengan tujuan undang-undang ini pasal 4 d yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

2. Sesuai ketentuan pasal 127 ayat (2) hakim berkewajiban memperhatikan ketentuan pasal 54, 55 dan pasal 103. Sehingga sebelum memeriksa perkara penyalah guna narkotika majelis hakim berkewajiban untuk menentukan apakah penyalah guna adalah seorang pecandu atau bukan. Terlebih bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasional bertujuan membangun manusia seutuhnya jika sarana penal yang menjadi pilihan untuk mencapai tujuan tersebut maka pendekatan humanistik harus lebih diutamakan khususnya dalam menentukan kebijakan penal terhadap penyalah guna narkotika.
3. Rumusan ketentuan Pasal 112 harus disempurnakan dengan menambahkan bahwa maksud menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan 1 secara tanpa hak atau melawan hukum adalah dengan tujuan bukan untuk konsumsi diri sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Adytia Bhakti. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 1998. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Edisi Revisi. Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arief. 1996. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan

- Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Cet. Kedua. Universitas Diponogoro: Semarang.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto seno Adji. 2010. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Lubuk Agung, Bandung
- Hari sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju.
- Soedarto, 1986. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Soejono Dirjosisworo. 1982. Pathologi Sosial. Bandung, Alumni.
- Widodo Dwi Putro. "Catatan Kritis Pembaca Independen" dalam Penerapan dan penemuan Hukum dalam Putusan Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia 2011.
- Undang-undang No.35 Tahun 2009. Tentang Narkotika

